



## ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI SUMATRA UTARA

Dina Meria Sinaga, Mulyo Hendarto<sup>1</sup>

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 5023, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the right palm oil plantation management policy for the local economy, with the objectives: (1) Knowing the problems and issues that happen today in the management of palm oil plantations in North Sumatra province. (2) Identify and analyze alternatives policy in the management of palm oil plantations in North Sumatra. (3) Establish strategies and the priority of the regulation to overcome the conflict of interest in palm oil plantations.*

*The data used in this study is primary and secondary data, moreover this study uses analytical hierarchy process method (AHP). Analyses were performed on thirteen alternatives of management policy of palm oil obtained from interviews with key persons. Alternative policy is divided into four aspects: Ecological aspects, Social, Institutional, and Economic. All of these alternatives policy will be analyzed on four component keys of the respondents (persons, local communities, the owner / entrepreneur oil, and oil workers).*

*The analyst shows that the most dominant policy strategy of most important by each respondent is a policy in the palm oil plantation management efforts. The policy of development and agro-processing of palm oil waste, establishing policy synergies and improve communication between government agencies and institutions legislative. The number of inconsistency ratio is  $<0.1$ , which means the results of these analyzes are consistent and acceptable.*

*Key Words : Plantation, Palm Oil, Sumatra Utara, AHP (Analytical Hierarchy Process)*

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian, sumber utama pangan maupun sebagai penopang pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari : (i) cakupan komoditasnya, meliputi berbagai jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim, (ii) hasil produksinya, merupakan bahan baku industri atau ekspor, sehingga pada dasarnya telah melekat adanya kebutuhan keterkaitan kegiatan usaha dengan berbagai sektor dan sub-sektor lainnya, dan (iii) pengusahaannya, sebagian besar dikelola/dikerjakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang tersebar di berbagai daerah, Didiek Goenadi (2005).

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia (Dimas, 2009). Pernyataan ini terbukti dari mayoritas penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian pada tahun 2009 yaitu sebesar 41,18 % atau hampir setengah dari penduduk usia kerja di Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 1, dan Dimas menambahkan bahwa produktivitas pertanian masih jauh dari harapan, dimana salah

---



satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian ini adalah sumber daya manusia dan minat di bidang pertanian yang masih sangat rendah dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya. Mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan lahan pertanian sehingga mengakibatkan kalah bersaing. Didiek Goenadi (2005) dalam Info Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian menambahkan bahwa peranan sektor ini di Indonesia masih dapat ditingkatkan lagi apabila dikelola dengan baik walaupun belum optimalnya penggarapan sampai saat ini.

**Tabel 1**  
**Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas**  
**Seluruh Indonesia Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**  
**Tahun 2005-2009 (dalam satuan persen)**

Lapangan Pekerjaan Utama	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian/Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	43,97%	42,05%	41,24%	40,30%	41,18%
Pertambangan dan Penggalian	0,96%	0,97%	1,00%	1,04%	1,09%
Industri Pengolahan	12,72%	12,46%	12,38%	12,24%	12,07%
Listrik, Gas dan Air	0,21%	0,24%	0,18%	0,20%	0,20%
Bangunan	4,86%	4,92%	5,26%	5,30%	4,41%
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	19,06%	20,13%	20,57%	20,69%	20,90%
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	6,02%	5,93%	5,96%	6,03%	5,69%
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan	1,22%	1,41%	1,40%	1,42%	1,42%
Jasa-Jasa	10,99%	11,90%	12,03%	12,77%	13,03%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Indonesia, 2005-2009

Salah satu subsektor pertanian yang berkembang pesat saat ini dan cukup besar potensinya adalah subsektor perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan ini telah menduduki urutan ketiga dalam penyumbang PDB pada tahun 2009 setelah subsektor tanaman bahan makanan dan perikanan dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada Tabel 2. Di masa yang akan datang, besar “harapan” pemerintah dari perkebunan-perkebunan ini dapat terwujud pembangunan wilayah terutama di luar pulau Jawa seperti yang tercantum dalam “TRIDHARMA” perkebunan yaitu : 1) menghasilkan devisa yang sebesar-besarnya, 2) membantu menciptakan kesempatan kerja, dan 3) melestarikan sumber-sumber alam (Mubyarto, 1989 : 235). Di samping itu dapat sebagai penopang pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari : (i) cakupan komoditasnya, meliputi berbagai jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim, (ii) hasil produksinya, merupakan bahan baku industri atau ekspor, sehingga pada dasarnya telah melekat adanya kebutuhan keterkaitan kegiatan usaha dengan berbagai sektor dan sub-sektor lainnya, dan (iii) pengusahaannya, sebagian besar dikelola/dikerjakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang tersebar di berbagai daerah, Didiek Goenadi (2005).

**Tabel 2**  
**Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian**  
**Tahun 2007-2009 (Milliar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha/Sub Sktor Pertanian	2007	Rasio terhadap total (%)	2008	Rasio terhadap total (%)	2009	Rasio terhadap total (%)	Ranking
1.	Tanaman Bahan Makanan	265090,9	48,92	349795,0	48,24	418963,9	46,84	1
2.	Tanaman Perkebunan	81664,0	15,07	124969,3	17,24	158722,1	17,75	3
3.	Peternakan dan hasilnya	61325,2	11,32	72676,4	10,02	104040,0	11,63	4
4.	Kehutanan	36154,2	6,67	40375,1	5,57	44952,1	5,03	5
5.	Perikanan	97697,3	18,03	137249,5	18,93	167773,9	18,76	2
	<b>TOTAL</b>	<b>541931,6</b>	<b>100</b>	<b>725065,3</b>	<b>100</b>	<b>894452,0</b>	<b>100</b>	

Sumber : Statistik Indonesia 2010 (data diolah)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan subsektor perkebunan yang menarik perhatian serius pemerintah, pihak investor serta petani terutama sejak dekade 1990-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) namun pada tahun yang sama pula dibuka Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.000 ha dan pada tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 8,32 juta ha dimana 47,78% dimiliki oleh PBS, 43,71% dimiliki oleh PR, dan 8,41% dimiliki oleh PBN. Bahkan, perkembangan perkebunan kelapa sawit pada saat ini telah meluas hampir ke semua kepulauan besar di Indonesia, hingga tahun 2009 perkebunan kelapa sawit mencapai rata-rata pertumbuhan 578.000 Ha/tahun atau sekitar 13,96 % per tahun yang dapat dilihat pada Tabel 3. Sampai saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 10 juta hektar lahan yang telah ditanami kelapa sawit. Diluar itu, sekitar 18 juta hektar hutan telah dibuka atas nama ekspansi perkebunan kelapa sawit. ( BPS, *Statistik Kelapa Sawit 2009*)

**Tabel 3**  
**Luas Areal Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia**  
**Menurut Pengusahaan (Ha)**

Tahun	Luas Areal (000 ha)					
	PR	%	PBN	%	PBS	%
1980	6	2	200	68,9	84	28,9
1990	292	25	372	33	463	41
2000	1167	28	588	14,1	2403	57,8
2007	2752	40,7	606	9	3409	50,3
2008	2903	41,4	608	8,7	3409	48,6
2009	3204	43,7	617	8,4	3501	47,8
Ptb%/th	24,2		4,0		13,7	

Sumber : Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2009

Ket: PR-Perkebunan Rakyat, PBN-Perkebunan Negara, PBS-Perkebunan Swasta

Kelapa sawit juga merupakan salah satu komoditi ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara sesudah minyak dan gas. Bahkan, mulai tahun 2006 Indonesia mampu mengejar Malaysia yang sebelumnya peringkat pertama dalam urusan minyak sawit, dimana selama ini Malaysia merupakan kompetitor Indonesia dalam penghasil minyak sawit yang menguasai pangsa pasar minyak sawit, sehingga pada tahun 2009 (data terbaru) Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi tahun 2009 sebesar 20,9 juta ton minyak sawit, kemudian diikuti dengan Malaysia dengan jumlah produksi 17,62 juta ton. Produksi kedua negara ini mencapai 85% dari produksi dunia yang sebesar 45,11 juta ton yang dapat dilihat pada Tabel 4. Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun sebagian besar ekspor minyak sawit dari Indonesia adalah dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang didapatkan relatif kecil. Pada tahun 2007 ekspor dari komoditi sawit dan turunannya adalah 83,97% dalam bentuk CPO, 14,25% dalam bentuk minyak inti sawit dan hanya 5,38% yang dalam bentuk produk turunan, sementara Malaysia, mayoritas ekspor komodita kelapa sawitnya dalam bentuk produk turunan. ( BPS, *Statistik Kelapa Sawit 2009*)

**Tabel 4**  
**Negara Produsen Utama Minyak Sawit Dunia, 2003-2009**

No.	Negara	Volume (000 Ton/Tons)							Rasio Terhadap Total (%)
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indonesia	10530	12350	14070	16050	16800	19200	20900	46,32
2	Malaysia	13355	13976	14963	15881	15823	17735	17620	39,05
3	Thailand	640	668	680	860	1020	1150	13010	28,83
4	Nigeria	785	790	800	815	835	830	860	1,91
5	Colombia	527	632	661	713	780	778	765	1,70
6	Ecuador	247	263	319	345	385	415	448	0,99
7	Others	2274	2493	2559	2478	2905	3016	3216	7,13
<b>Total</b>		<b>28111</b>	<b>30909</b>	<b>33732</b>	<b>37142</b>	<b>38163</b>	<b>43124</b>	<b>45119</b>	<b>100</b>

Sumber : Oil World Annual (2003-2009)

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara juga menunjukkan trend pertumbuhan yang selalu positif, hingga pada tahun 2009 luas areal kelapa sawit di Sumatera Utara sudah mencapai 1.290.977 ha dengan jumlah produksi 3.996.465 ton (seperti yang telah dipaparkan pada Tabel 2) serta dapat menyerap tenaga kerja sekitar 4,7 juta orang. Sumatera Utara sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara setiap tahun mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. Sehingga kehadiran perkebunan kelapa sawit (Perusahaan Perkebunan Sawit) yang telah lama ada di Indonesia dan tidaklah berlebihan jika Sumatera Utara mempunyai perhatian yang paling besar, karena merupakan tempat kelahiran komoditas kelapa sawit di Indonesia.

**Tabel 5**  
**Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit**  
**Sumatera Utara 2005-2009**

No.	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Total Seluruh Indonesia (Ha)	Rasio Terhadap Total (%)
1	2005	894.911	5.950.321	15,04
2	2006	1.044.230	6.284.960	16,61
3	2007	1.108.020	6.853.916	16,17
4	2008	1.245.205	7.333.707	16,98
5	2009*	1.290.977	7.534.581	17,13

Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2005-2009

\*Data Sementara

Daya tarik dan dukungan yang kondusif seperti kondisi iklim serta didukung oleh prasyarat ketersediaan lahan luas dan juga pertumbuhan yang selalu positif setiap tahunnya inilah yang menjadikan perkebunan kelapa sawit berkembang dengan pesat di Sumatera Utara dan telah membawa perkebunan sawit tersebut sebagai bentuk usaha yang semula menjadi symbol *enclave economy* (tertutup), kini telah menjadi usaha dengan beragam format dan corak pola pengusahaan. Bahkan, perkembangan Industri berbasis sawit terakhir ini juga telah menghantar hingga berlakunya teori *dualisme* ekonomi ala Boeke dimana dalam praktek pembangunan ekonomi ada dua kelompok penting yang menjalankan roda perekonomian tersebut yaitu kelompok ekonomi lemah (masyarakat yang hanya sebagai buruh sawit) dan kelompok ekonomi kuat (baik investor asing maupun investor dalam negeri yang menguasai perkebunan sawit). (Mubyarto, 2000).

Pentingnya peranan perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian nasional khususnya bagi pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan pengelolaan perkebunan kelapa sawit menjadi sangat penting dicarikan solusinya. Sejauh ini, kebijakan yang ada dirasa belum sepenuhnya mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua pemangku kepentingan yang ditandai oleh adanya sejumlah masalah bahkan konflik antar pelaku. Untuk itu diperlukan perbaikan sejumlah kebijakan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan terkena dampak langsung maupun tidak langsung kebijakan yang dibuat pemerintah melalui kajian yang komprehensif.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, para pelaku ekonomi (baik masyarakat, pemerintah bahkan pihak swasta/asing) melakukan berbagai macam cara dengan melihat berbagai potensi-potensi yang dimilikinya. Salah satunya adalah dengan cara melakukan perkembangan perluasan lahan pada sector perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia khususnya di Propinsi Sumatera Utara. Namun, aktivitas suatu sector perekonomian harus mampu bekerjasama dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan ekonomi yaitu tidak terjadinya *welfare loss* (kehilangan kesejahteraan masyarakat) karena akan berimbas pada perekonomian secara makro.

Dengan pengelolaan yang tepat, komoditas kelapa sawit memegang peranan sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional terutama sebagai sumber pendapatan non migas nasional, sebagai sumber kesempatan kerja bagi jutaan penduduk pedesaan dan

sebagai sumber energi. Perhatian utama perkebunan kelapa sawit adalah daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha.

Indonesia dengan luas lahan sawit terbesar di dunia dan penghasil minyak kelapa sawit terbesar masih memiliki peluang meningkatkan produksi karena ketersediaan lahan serta kesesuaian iklim, asal didukung oleh kebijakan pemerintah dengan mengintegrasikan kepentingan semua pemangku kepentingan (pemerintah, petani, pengusaha) dalam pengembangan perkebunan sawit.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel-variabel AHP yaitu berupa alternatif-alternatif kebijakan dari empat aspek terkait dalam upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatra Utara yaitu aspek ekologi atau lingkungan, aspek sosial, aspek kelembagaan, dan aspek ekonomi. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengurangi konflik hak atas tanah dgn reformasi tanah berdasarkan hukum
2. Menumbuhkembangkan usaha perkebunan kelapa sawit di pedesaan.
3. Pemberdayaan masyarakat local.
4. Peningkatan produktivitas dan mutu kelapa sawit.
5. Pengembangan industri hilir dan peningkatan nilai tambah kelapa sawit
6. Dukungan penyediaan dana.
7. Pengembangan pasar minyak kelapa sawit dan produk turunannya serta penetapan harga TBS
8. Pengembangan agroindustri yang mengolah limbah kelapa sawit
9. Moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan.
10. Penggunaan lahan terdegradasi untuk pemeliharaan kelapa sawit.
11. Menjalin sinergi kebijakan dan meningkatkan komunikasi.
12. Pengembangan aturan (UU dan aturan pelaksanaannya).
13. Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja aparat yang bertugas.

Proses hirarki analitik (*analytical hierarchy process*, AHP) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan kesisteman, mencakup penentuan prioritas pilihan-pilihan dengan banyak kriteria. Saaty (1993), menyatakan bahwa AHP adalah penyederhanaan suatu situasi yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponennya, menata bagian atau variabel itu ke dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang relative pentingnya setiap variabel, dan mensintesis berbagai pertimbangan tersebut untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis secara keseluruhan (*overall*) skala prioritas kriteria dan alternatif pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan metode AHP dalam upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatra Utara yang paling penting untuk dilakukan dan memiliki nilai prioritas tertinggi oleh seluruh responden adalah kebijakan pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit dengan nilai bobot 0,145 untuk *key persons*, 0,128 untuk responden masyarakat lokal, 0, 105 untuk

responden pengusaha sawit dan 0,145 untuk responden buruh sawit. Namun, pada urutan prioritas selanjutnya terdapat perbedaan di antara masing-masing responden. Berikut ini adalah perbandingan urutan prioritas alternatif yang termasuk dalam urutan (ranking) tiga besar dalam kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatra Utara oleh masing-masing responden.

**Tabel 6**  
**Perbandingan Urutan Prioritas Alternatif Kebijakan Dalam Upaya Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Masing-masing Responden**

No.	Responden	Urutan Prioritas Kebijakan		
		1	2	3
1	<b>Key Person</b> (n=7)	Limbah (Nilai Bobot 0,157) Aspek Ekologi	Konflik (Nilai Bobot 0,143) Aspek Sosial	Moratorium (Nilai Bobot 0,139) Aspek Ekologi
2	<b>Masyarakat Lokal</b> (n=10)	Moratorium (Nilai Bobot 0,128) Aspek Ekologi	Limbah (Nilai Bobot 0,113) Aspek Ekologi	Konflik (Nilai Bobot 0,097) Aspek Sosial
3	<b>Pengusaha/pemilik Sawit</b> (n=10)	Komunikasi (Nilai Bobot 0,129) Aspek Kelembagaan	Limbah (Nilai Bobot 0,105) Aspek Ekologi	Konflik (Nilai Bobot 0,096) Aspek Sosial
4	<b>Buruh Sawit</b> (10)	Limbah (Nilai Bobot 0,145) Aspek Ekologi	Moratorium (Nilai Bobot 0,128) Aspek Ekologi	Konflik (Nilai Bobot 0,127) Aspek Sosial

Sumber : Output AHP, 2012

Pengembangan agroindustri yang mengolah minyak sawit dan juga limbah kelapa sawit merupakan alternatif kebijakan yang menjadi prioritas utama dalam upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang optimal. Seiring dengan bertambahnya luas lahan kelapa sawit setiap tahunnya di provinsi Sumatra Utara, diprediksi akan menghasilkan TBS lebih dari 19 juta ton per tahun dan 4,1 juta ton CPO per tahun. Produk ini sangat potensial dikembangkan industri hilirnya. Hal ini menyebabkan produksi TBS tidak seimbang dengan PKS(pabrik Kelapa sawit) yang ada. Guna mengimbangi produksi kelapa sawit berupa TBS (Tandan Buah Segar), diperlukan tambahan PKS untuk menampung TBS yang tersedia di wilayah sekitarnya. Namun, dengan bertambahnya jumlah Pabrik Kelapa Sawit tersebut sudah seharusnya ada pengembangan agroindustri yang mengolah limbah sawit yang sangat berdampak pada masalah lingkungan yang selalu di perbincangkan saat ini. Maka, dengan adanya pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit ini karena salah satu penyebab konflik pengembangan perkebunan kelapa sawit di Sumut adalah banyaknya kecamatan yang ditinggalkan tentang buruknya dampak kelapa sawit terhadap lingkungan dan isu-isu yang mengakibatkan lemahnya daya saing kelapa sawit Indonesia dan telah memberikan dampak yang negatif bagi kelanjutan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan (hasil wawancara dengan salah satu *Key Persons* (Bapak Asmar Arsyad selaku SEKJEN



APKA Sindo). Sehingga dengan adanya pengembangan agroindustri yang mengolah minyak sawit dan limbah sawit ini, diharapkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat berjalan dengan optimal dan berjalan secara efektif.

Pengembangan perkebunan dan industri minyak kelapa sawit bahkan telah menimbulkan kontroversi di masyarakat internasional. Di satu pihak, pengembangan kelapa sawit dan industri kelapa sawit memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara; di lain pihak hal ini menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Contohnya : beberapa negara Eropa dan Amerika telah memboikot produk kelapa sawit sebagai protes atas dampak negatif sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Isu yang mengemuka adalah produksi kelapa sawit yang terus mengalami peningkatan di Indonesia (dan Malaysia) telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain *forest conversion, habitat loss, endanger species*, serta *greenhouse effect and climate change*. Isu-isu ini berdampak pada tidak stabilnya harga CPO dunia (Balaman Tarigan, 2011/Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang SUMUT). Mulai tahun 2011, Uni Eropa telah memberlakukan EU Directive mengenai ketentuan emisi rumah kaca. Dalam aturan ini disebutkan bahwa EU tidak boleh mengimpor CPO karena komoditas ini dianggap tidak memenuhi ketentuan pembatasan emisi, akibatnya CPO tidak bisa masuk ke pasar Uni Eropa.

Untuk meminimalkan efek-efek negatif dari pengembangan perkebunan sawit tersebut dengan menciptakan, produk yang ramah lingkungan, dengan berpegang kepada konsep *triple bottom line* yaitu Profit, People, dan Planet yang artinya setiap kegiatan industri ini harus selalu berpedoman dan berorientasi kepada ketiga aspek tersebut.

Untuk itu beberapa langkah strategis telah dicanangkan seperti:

1. RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), yaitu suatu badan yang mengeluarkan sertifikat bagi perusahaan yang mengelola perkebunannya dengan baik dan ramah lingkungan, dan negara negara Eropa tidak akan menerima ekspor minyak sawit tanpa terlebih dahulu memiliki sertifikat RSPO tersebut.
2. ISCC (International Sustainable Carbon Credit), yaitu juga suatu sertifikat yang dikeluarkan negara2 Eropa, yang mana apabila perusahaan telah memilikinya, maka harga minyak sawitnya persatuan berat akan diberi premi harga (lebih tinggi dari harga pasaran)
3. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan bahwasanya tidak diperbolehkannya pengelolaan perkebunan sawit di lahan yang ber gambut (peat soil)
4. Tidak dibenarkannya pembakaran untuk pembangunan perkebunan (zero burning).
5. Adanya program plasma, dimana untuk lebih menjamin masyarakat lokal ikut menikmati dampak dari perkebunan disekitarnya, maka perusahaan wajib membangun kebun sawit buat anggota masyarakat 2 ha per KK

Dan tentunya dikemudian hari langkah-langkah strategis lain akan dikembangkan untuk lebih menjamin bahwasanya efek dari pengelolaan perkebunan dapat di minimalkan. Dan dalam rangka memenuhi tuntutan internasional agar kelapa sawit dapat diproduksi secara berkelanjutan, maka pada tahun 2004 telah dikembangkan *the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* yang diikuti oleh tujuh kelompok kepentingan, yaitu produsen kelapa sawit, pengolah atau pedagang kelapa sawit, konsumen produk olahan kelapa sawit, pengecer, bank dan investor, bidang lingkungan atau konservasi alam, serta bidang sosial atau pembangunan. Tujuan RSPO adalah untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui standard global yang kredibel dan keterlibatan para pihak.

Berdasarkan hasil analisis AHP oleh masing-masing responden terdapat beberapa perbedaan urutan prioritas alternatif kebijakan dalam upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatra Utara. Hal tersebut wajar dan tidak jadi masalah, karena setiap





responden pada penelitian ini memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda-beda antara responden yang satu dengan responden yang lainnya yang tidak dapat dipungkiri. Responden *Key Persons* memilih tiga kebijakan prioritas tertinggi dari tiga belas (13) alternatif kebijakan yang ada yaitu pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit, mengurangi konflik hak atas tanah dgn reformasi tanah berdasarkan hukum dan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan. Selanjutnya untuk responden masyarakat lokal memilih pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit, moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan dan mengurangi konflik hak atas tanah dengan reformasi tanah berdasarkan hukum. Kemudian responden pengusaha/pemilik sawit menetapkan tiga besar kebijakan prioritas utama yaitu menjalin sinergi kebijakan dan meningkatkan komunikasi antara lembaga pemerintah dan lembaga legislatif, pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit dan mengurangi konflik hak atas tanah dengan reformasi tanah berdasarkan hukum. Responden buruh sawit memilih pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit, moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan dan mengurangi konflik hak atas tanah dengan reformasi tanah berdasarkan hukum.

## KESIMPULAN

Gambaran permasalahan dan isu pokok yang sedang berkembang di lokasi-lokasi perkebunan saat ini yaitu rendahnya tingkat pendidikan sehingga adopsi dan motivasi petani sawit untuk mengelola kebun sawit juga rendah; adanya kebijakan pemerintah yang tidak mendorong pengembangan sawit; pemerintah tidak lagi pelaku utama perkebunan kelapa sawit; dalam hal penentuan harga TBS petani sawit masih lemah; perubahan status petani tanaman bahan makanan dari pemilik lahan menjadi buruh sawit (tenaga upahan); tidak tegasnya pemerintah dalam hal perijinan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sehingga masih ada konflik perebutan lahan antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat lokal sehingga terjadi isu kekerasan dan pelanggaran HAM; kerusakan ekosistem yang tiada henti-hentinya; pemberdayaan masyarakat lokal yang belum optimal menyebabkan gejolak sosial; dukungan infrastruktur dan teknologi produktivitas yang belum memadai.

Berdasarkan hasil diskusi panel dengan *keyperson*, wawancara mendalam dan AHP ditemukan bahwa untuk menyusun kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek ekologi, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek kelembagaan. Kegiatan yang perlu diprioritaskan dalam menyusun strategi pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian peningkatan pendapatan pelaku usaha. Untuk mewujudkan prioritas tersebut, terdapat 4(empat) alternatif kebijakan yang paling efektif dan terpenting yang berpengaruh, yaitu (1) Kebijakan pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit dengan nilai bobot 0,145 untuk *key persons*, 0,128 untuk responden masyarakat lokal, 0,105 untuk responden pengusaha sawit dan 0,145 untuk responden buruh sawit (2) Moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan dengan nilai bobot 0,139 untuk *key persons*, 0,113 untuk responden masyarakat lokal, 0,093 untuk responden pengusaha sawit dan 0,128 untuk responden buruh sawit (3) Menjalinkan sinergi kebijakan dan meningkatkan komunikasi antara lembaga pemerintah dan lembaga legislatif dengan nilai bobot 0,074 untuk *key persons*, 0,096 untuk responden masyarakat lokal, 0,129 untuk responden pengusaha sawit dan 0,097 untuk responden buruh sawit (4) mengurangi konflik hak atas tanah dgn reformasi tanah berdasarkan hukum dengan nilai bobot 0,143 untuk *key persons*, 0,097 untuk responden



masyarakat lokal, 0,096 untuk responden pengusaha sawit dan 0,128 untuk responden buruh sawit.

## SARAN

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penelitian, beberapa saran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pengembangan agroindustri yang mengolah limbah kelapa sawit dan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan sebagai alternatif kebijakan yang utama sebaiknya perlu mendapat perhatian dan disikapi dengan bijak dalam upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara berjalan dengan efektif dan optimal.
2. Bagi pemerintah. Kebijakan penyelesaian status dan konflik lahan yang telah diberikan izin pengolahan kepada perusahaan namun belum dimanfaatkan, terutama terhadap izin yang telah berakhir masa berlakunya serta optimalisasi pemanfaatan program revitalisasi perkebunan Pemerintah Pusat maupun daerah antara lain sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan kebun.
3. Bagi pengusaha perkebunan. Pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit hendaknya dilaksanakan dalam sistem agroindustri yang terintegrasi antara perkebunan dan pabrik yang dikelola petani menuju terwujudnya petani pekebun yang mandiri, melalui pemberdayaan masyarakat pekebun.
4. Bagi petani dan masyarakat lokal. Dukungan petani dan masyarakat dibutuhkan untuk bersama-sama mengawal dan membawa perkebunan kelapa sawit Indonesia khususnya Sumatra Utara menjadi yang terdepan dan terbesar, dan petani dan masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menuntut haknya namun tidak melaksanakan kewajibannya.
5. Bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini tidak secara detail menjelaskan masing-masing alternatif kebijakan dalam upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatra Utara. Untuk itu, dalam penelitian lebih lanjut perlu dilakukan kajian dari aspek kelembagaan mengenai kebijakan peningkatan dan pengembangan penelitian dalam bidang perkebunan kelapa sawit guna pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilengkapi dengan basis pengetahuan dalam ketepatan pengambilan keputusan.

## REFERENSI

- Anonim.2003. *Pedoman Penyusunan Skripsi Dan Pelaksanaan Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : Semarang
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Agustanto, Basmar. 2008. *Arahan Pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu Berbasis Komoditas Kelapa di Kabupaten Lampung Barat*. Sekolah Pasca Sarjana IPB : Bogor  
[www.damandiri.or.id/file/agustantobasmariipbcover.pdf](http://www.damandiri.or.id/file/agustantobasmariipbcover.pdf). Diakses : 13 Maret 2012



- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- BPS. 2008. *Sumatera Utara dalam Angka*. BPS Sumatera Utara
- BPS. 2009. *Statistik Indonesia 2009*. Badan Pusat Statistik: Jakarta
- BPS. 2010. *Statistik Indonesia 2010*. Badan Pusat Statistik: Jakarta
- BPS. 2009. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2008*. Badan Pusat Statistik: Jakarta
- BPS. 2010. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2009*. Badan Pusat Statistik: Jakarta
- Didiek, Goenadi.H. 2005. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit di Indonesia*. Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian: Jakarta  
[http://www.litbang.deptan.go.id/special/publikasi/doc\\_perkebunan/sawit/sawit bagian-a.pdf](http://www.litbang.deptan.go.id/special/publikasi/doc_perkebunan/sawit/sawit%20bagian-a.pdf). Diakses : 15 September 2011
- Dinas Perkebunan Propinsi SUMUT. (2009). *Laporan tahunan*. Medan: Dinas Perkebunan Propinsi Sumut.
- Dini, Bayu A. 2010. *Analisis Strategi Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Perkembangan Industri Kelapa Sawit Nasional*. Jurnal Teknologi Industri Pertanian. Institut Pertanian Bogor  
[www.repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/.../2011dba.pdf?..1](http://www.repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/.../2011dba.pdf?..1). Diakses : 13 Maret 2012
- Djohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Penerbit LP3ES: Indonesia, Jakarta
- Feby, Anisia P.S. 2011. *Analisis Kebijakan Penanganan Kemacetan Lalulintas di Jalan Teuku Umar Kawasan Jatingaleh Semarang Dengan Metode Analisis Hirarki Proses (AHP)*. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : Semarang
- Franky, O. Widjaja.2010. *Fakta Kelapa Sawit Indonesia*. Tim Advokasi Minyak Sawit Indonesia (TAMSI): Jakarta
- Gadang, Dimas T.S. 2009. *Analisis Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa Tengah*. FakultasEkonomi Universitas Diponegoro : Semarang
- Gumbira-Sa'id, E. 2010. *Review Kajian, Penelitian dan Pengembangan Agroindustri Strategis Nasional: Kelapa Sawit, Kakao dan Gambir*. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 19 (1): 45 – 55.



- Irawan dan M. Suparmoko.1997. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta : BPFE
- Kartika, Selly. 2010. *Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem di Provinsi Jawa Tengah*. FakultasEkonomi Universitas Diponegoro : Semarang
- Miranti, E. 2004. *Potensi Bisnis Kelapa Sawit Indonesia*. Buletin Analisis Perbankan Indonesia, Jakarta.
- Miranti, E. 2010. *Prospek Pengembangan Kelapa Sawit 2010*. *Economic Review No. 219 Maret 2010: 1 – 12*.
- Mubyarto, 1986. *Pembangunan Pertanian dan Politik Pertanian*, Jakarta : LP3ES
- Mudrajad, Kuncoro. 2006. *Ekonomika Pembangunan Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mudrajad, Kuncoro. 2001. *Metode Kuantitatif Edisi Kedua*. Yogyakarta: Lembaga Penerbit UPP AMP YKPN
- Mulyana, A. 2007. *Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Sumatera Selatan dari Perspektif Pasar Monopoli Bilateral*. Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Nasendi, B. D., 1986. *Analisis Perencanaan*. Paket Kuliah Bahan Riset Operasi Terapan. Pasca Sarjana IPB Bogor
- Noer, Soetrisno.2008. *Peranan Industri Sawit Dalam Pengembangan Ekonomi Regional*. Seminar Nasional. Universitas Sumatra Utara, Medan
- Noor, Ariadi. 2004. *Analisis Kebijakan Pengembangan Marikultur di Kepulauan Seribu*. Sekolah Pasca Sarjana IPB: Bogor  
[www.repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/.../2003ano\\_abstract.pdf?...1](http://www.repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/.../2003ano_abstract.pdf?...1)  
. Diakses : 15 Maret 2012
- Pasaribu, W. 2010. *Analisa Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Rakyat Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, USU, Medan.
- Purnama, Setya Wahyu. 2004. *Perwilayahan Pengembangan Usaha tani Berbasis Agribisnis di Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta*. Tesis Magister. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
- Saaty, Thomas L. 2003. *The AnalyticalHirarchy Process*. USA: mc. Graw-Hill.



- Sadono, Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soediyono. 1995. *Ekonomi Makro Edisi Ketiga: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Liberty, Yogyakarta.
- Soeratno, Lincolin Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Supriadi, Herman. 2009. *Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Institut Pertanian Bogor.  
<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/ART6-4d.pdf>. Diakses : 12 Desember 2011
- Syaifullah. 2010. Pengenalan Metode AHP ( *Analitycal Hierarchy Process*)  
[www.syaifullah08.wordpress.com/2010/02/21/pengenalan-metode-ahp](http://www.syaifullah08.wordpress.com/2010/02/21/pengenalan-metode-ahp).  
Diakses : 13 Maret 2012
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, M.P. 1990. *Pembangunan Ekonomi Edisi Keenam*. Alis Bahasa Oleh Haris Munandar, Penerbit Erlangga : Jakarta
- [http : // bps.go.id](http://bps.go.id), Badan Pusat Statistik  
[http : // sumut.bps.go.id/](http://sumut.bps.go.id/), Badan Pusat Statistik